



PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 139 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya jua lah, Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dapat terselesaikan. Dokumen ini disusun dengan merujuk pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dari semua bidang dan sekretariat serta usulan dari berbagai pihak yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2023 dengan memperhitungkan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan.

Disamping untuk mencukupi ketentuan perundang-undangan, melalui penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah /Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum.

Akhirnya, kami berharap kiranya dokumen ini menjadi rujukan strategis dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023, dapat terlaksana dengan baik pada saatnya serta bersama-sama dengan OPD lain memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan bagi keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga menuju terwujudnya Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya saing, menuju Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak mulia.

Purbalingga, 10 Juli 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

RENCANA BAPPELITBANGDA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 139 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	63
BAB V PENUTUP.....	81
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUB).....	xvi



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-3 (tiga) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **28 Juli 2022**

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR **139** TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja PD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga:
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 139 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2023 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian kinerja Renja tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan, dengan memetakan program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Renja OPD (Th 2021)	Realisasi Renja OPD (Th 2021)	Capaian Realisasi Kinerja Renja OPD (Th 2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	%	100	100	100
			Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
			Rata rata capaian SKP	Angka	90	103	114,44
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	82,68	100,83
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	2	2	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Dokumen	6	6	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	Bulan	12	12	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	Persen	100	100	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/ undangan/SPPD Dalam Daerah ($\geq$ 8 jam) Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	OK	320	204	63,75
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	OK	12	12	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM	Bulan	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	%	100	100	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	OK	6	6	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Bulan	12	12	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Jenis	6	6	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	15	15	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	12	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	Lembar	46000	46000	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	Eksemplar	12	12	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	54	54	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	OK	606	606	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	%	100	99,67	99,67
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3	3	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	Bulan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	Bulan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	9	75

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TersedianyaTersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	OB	12	12	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll) Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	33	33	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Jenis	6	6	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)	Unit	1	1	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kualitas dokumen perencanaan kabupaten	%	100	99,23	99,23
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Desa yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD Jumlah Forum OPD yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD Jumlah Kecamatan yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD	Usulan	284	284	100
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti	Kegiatan	5	5	100
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen	3	3	100
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan rekomendasi data dan informasi pemerintahan daerah	%	100	75	75

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan	Dokumen	3	3	100
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan program RPJMD yang tercapai kinerja sasaran	%	100	83,33	83,33
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usulan dan pelaporan kinerja TP, DAK, dan Bangub	Dokumen	2	2	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	Dokumen	4	3	75
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPd	%	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	28	28	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Dokumen	5	5	100
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen bidang ekonomi kreatif tersusun Jumlah dokumen perekonomian tersusun	Dokumen	5	5	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen sda tersusun	Dokumen	2	2	100
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur tersusun	Dokumen	3	3	100

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Indikator	Satuan	K	K	K
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen keciptakarya tersusun	Dokumen	3	3	100
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga lptek	Lembaga	7	9	128,57
			Frekuensi diseminasi hasil litbang	Desiminasi	4	0	0
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	%	100	33,54	33,54
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang terfasilitasi dalam kegiatan KKN	PT Mahasiswa	7 1750	9 587	128,6 33,54
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi penerapan litbang	Rekomendasi	1	1	100
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah pelaksanaan lomba krenova	Kegiatan	1	0	0
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Workshop	1	0	0

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja target 4 (empat) Program pada Renja Tahun 2021, realisasinya hampir seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target yaitu meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Untuk mencapai kinerja program, Bappelitbangda melaksanakan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dari 15 kegiatan tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. Kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 2. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 3. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 untuk seluruh OPD termasuk Bappelitbangda harus melaksanakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan *pandemic covid 19*.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian kinerja kelembagaan

dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga mendapatkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran strategis yang telah ditetapkan membandingkan dengan realisasi kinerjanya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP komponen perencanaan	25	21,14	84,56%
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	97,7%	80%	81,88%
			Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan kapasitas Lembaga kelitbangan daerah yang berkualitas		Inventor purbalingga masuk dalam nominator kreator tingkat provinsi	1 nominator	1 nominator	100%
		Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	65%	100%	153,84%
	Rata-Rata Capaian Kinerja					104,05%

Pada tabel di atas terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja dan dua sasaran strategis dengan lima indikator kinerja. Dari kelima indikator tersebut, telah mencapai realisasi kurang/lebih dari target yang telah

ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 0% hingga 153,84%. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 5 indikator kinerja mencapai 104,05%. Adapun capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan menilai tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, terjadinya keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dan pencapaian target kinerja sasaran pembangunan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Tahun 2021

No	Indikator Program	Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	Presentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%
2.	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	78%	77,15%	98,91%
3.	Tingkat pencapaian target kinerja sasaran pembangunan	100 %	50 %	50 %

1) Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dihitung dari kesesuaian jumlah program RKPD terhadap jumlah program

RPJMD. Dari 160 jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sudah terakomodir semua dalam dokumen RKPD, sehingga tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah 100% sesuai dengan target pada tahun 2021 yaitu 100%.

2) Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD

Indikator Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD menggambarkan peran serta masyarakat dalam pembangunan (pendekatan partisipatif) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan dari empat pendekatan perencanaan yakni pendekatan partisipatif, politik, teknokratik dan bottom up – top down. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang terakomodir semakin menunjukkan perencanaan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Target dari indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 78 persen, sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 77,15 persen dan capaian sebesar 98,91 persen.

3) Tingkat Pencapaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan

Tingkat pencapaian target kinerja sasaran pembangunan sebesar 50 persen. persentase tersebut di dapatkan dari data yang masuk dari seluruh OPD (data sementara), karena ada beberapa OPD yang memang hasilnya keluar di tahun berikutnya. Sehingga capaian ini akan bertambah ketika data dari OPD sudah masuk kembali.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah membaiknya Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD, serta Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD.

Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021

No	Indikator Program	Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 %	100 %	100 %
3.	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	100 %	75%	75%

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran dari program ini adalah hasil kelitbangan yang di diseminasikan dan Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga IPTEK. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2021

No.	Indikator Program	Target 2021	Realisasi	Capaian
1	Frekuensi diseminasi hasil litbang	4	-	-
2	Jumlah kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga IPTEK	7	9	128,57%

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran dari program ini adalah tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD, Persentase pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BAPPELITBANGDA. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tahun 2021

No	Indikator Program	Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	Persentase temuan pengelolaan anggaran yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,68	103,35%
3.	Rata-rata Capaian SKP	90	103	114,44%

1) Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

Tahun 2021 Tim APIP Inspektorat Kabupaten melaksanakan audit operasional tahun anggaran 2020. Terhadap temuan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, sehingga target 100 % tercapai.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

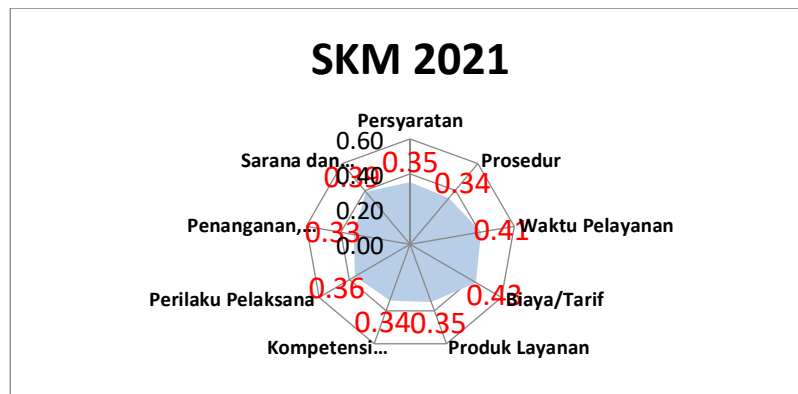
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat, maka telah dilaksanakan survey pengukuran “Kepuasan Masyarakat”. Survey dimaksud bertujuan untuk mendapatkan feed back/ umpan balik atas

kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat pula mewujudkan kepemimpinan pemerintahan yang baik (good leadership governance).

Secara normative, kegiatan ini sekaligus untuk mencukupi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey IKM dilakukan secara mandiri pada bulan Januari s/d Maret 2021 dengan mengambil sampel sejumlah 31 responden. Kuesioner survey kepuasan masyarakat menggunakan daftar pertanyaan dengan 9 variabel yakni persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Target dari indikator kinerja tahun 2021 adalah sebesar 80, dan terealisasi 82,68. Kesimpulan yang didapat dari hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) bahwa prosedur pelayanan masyarakat sudah baik dan agar dapat di tingkatkan.

**Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021**



3) Rata-rata Capaian SKP

Sasaran kinerja pegawai adalah 28 pegawai negeri sipil, terdiri 17 pejabat struktural dan 12 pelaksana. Rata-rata capaian SKP seluruh PNS di BAPPELITBANGDA tahun 2021 sebesar 103 dari target 90, sehingga capaian rata-rata SKP adalah 114,4%.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda					Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda					Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5		6	7	5	9	10	11	12		13
	Tujuan I : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel													
1.	Skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP	-	-	20	21	22	23	25	18,88	19,15	20,02	20,14	NA	
2.	Inventor purbalingga masuk dalam nominator Krenova tingkat Provinsi	-	-	2	2	2	2	2	1	1	0	2	1	
	Sasaran I.1 Meningkatnya kualitas perencanaan													
3.	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	-	-	96	97	97,5	97,5	98	102,44	99,87	85	86	80	
4.	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	-	-	100	100	100	100	100	93,9	90	98	97	100	
5.	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	50	50	55	60	65	50	50	0	100	100	
	Program 1 : Program Perencanaan Pembangunan Daerah													
6.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sesuai rumpun Bidang	-	-	100	100	100	100	100	93,9	90	98	97	100	

1	2	3	4	5		6	7	5	9	10	11	12		13
7	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	-	-	28	29	76	33	28	36,07	23	75	36,07	77,15	
8	Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	75	100	100	75	75	
9	Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	-	-	100	100	100	100	100	100	75	75	100	100	
Program 2 : Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
10	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah sesuai rumpun bidang	-	-	96	97	97,5	97,5	98	102,44	99,87	85	86	80	
11	Tingkat keselarasan Renstra PERANGKAT DAERAH terhadap RPJMD sesuai rumpun bidang	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Tingkat keselarasan Renja PERANGKAT DAERAH terhadap RKPD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	85	100	75	

1	2	3	4	5		6	7	5	9	10	11	12		13
	Program 3 : Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi													
13	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	
15	Jumlah kerjasama kelitbangan	-	-	6	47	7	7	7	8	48	15	8	9	
	Tujuan 2. Mewujudkan kapasitas Lembaga Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel													
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappelitbangda	-	-	79,7	79,8	79,9	79,95	80	86,45	83,57	83,57	86,45	82,68	
	Program 4 : Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah													
17	Persentase Rekomendasi APIP yg ditindaklajuti	-	-	100	100	100	100	100	100		100	100	100	
18	Rata-rata Capaian SKP	-	-	87	88	88	88	88	85		84,71	85	103	
19	Tingkat Ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	-	-	100	100	100	100	100	100		100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial;
2. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD);
3. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
5. Adanya Implikasi dampak *pandemic covid 19* pada scenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.01 PERENCANAAN						5.01 PERENCANAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BAPPELITBANGDA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	4.816.048.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BAPPELITBANGDA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	4.649.480.000	
		Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen				Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	persen				Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	persen		
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen				Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen		
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	11.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	4.565.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RTP	2	dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.490.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, laporan bulanan, laporan pengendalian renja, dan RB) yang tersusun	5	Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan	5	Laporan	2.075.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								RB)				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Persen	4.044.765.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Persen	3.947.321.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	31	Orang/bulan	3.702.977.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan	3.755.471.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	Jumlah kunjungan lapangan/survey/kordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	265	kali	198.161.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99	Dokumen	132.242.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELITBANGDA	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	1202	dokumen	143.627.000	Koordinasi dan Pelaksanaan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1202	dokumen	59.608.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						aan Akuntansi SKPD		Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	BAPPELITBANGDA	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	16.280.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	BAPPELITBANGDA	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	6.756.000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	2	dokumen	16.280.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	6.756.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	0	orang	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	43	orang	52.915.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPELITBANGDA	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	0	orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPELITBANGDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	orang	11.413.000	Diperluakannya kegiatan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM Bappelitbangda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43	orang	41.502.000	Diperluakannya kegiatan bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM Bappelitbangda
Administrasi Umum	BAPPELITBANGDA	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	bulan	83.153.000	Administrasi Umum	BAPPELITBANGDA	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	bulan	35.141.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Jenis Perlengkapan Listrik	10	jenis	4.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	1.826.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	60	jenis	28.543.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	paket	12.477.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah surat kabar yang tersedia	24	eksemplar	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	dokumen	996.000	
Penyediaan Fasilitas Tamu	BAPPELITBANGDA	Tersedianya jamuan tamu	12	bulan	6.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	2.739.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	Tersedianya jamuan rapat	12	bulan	19.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	7.989.000	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	BAPPELITBANGDA	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3	jenis	21.960.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24	dokumen	9.114.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPPELITBANGDA	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	buah	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPPELITBANGDA	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Pengadaan peralatan dan jesin lainnya	0	unit	-	Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	0	unit	-	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah jenis sarpras gedung kantor yang tersedia			-	Pengadaa n sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELITBANGDA	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	417.046.000	Penyedia an Jasa Penunjan g Pemerint	BAPPELITBANGDA	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	427.518.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELITBANGDA	Jumlah jasa surat menyurat	2	jenis	1.787.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	laporan	630.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPELITBANGDA	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi, Jasa Internet	12	bulan	86.469.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	104.640.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2	jenis	7.040.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	622.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPELITBANGDA	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi, Petugas Administrasi	14	OB	321.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	laporan	321.626.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELITBANGDA	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan	243.804.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELITBANGDA	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan	175.264.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	30	unit	179.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	unit	148.384.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	10	unit	14.769.000	Pemelihaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	6.129.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	50.000.000	Pemelihaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	20.751.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 82,33 100	persen persen persen	598.284.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 82,33 100	persen persen persen	439.656.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPELITBANGDA	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	415.236.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPELITBANGDA	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan	100	persen	319.507.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								ketentuan				
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	284	usulan	59.850.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BAPPELITBANGDA	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	284	dokumen	24.839.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti (Musren RKPD, Musren Provinsi, Musren Nasional, Konsultasi Publik,	5	kegiatan	148.200.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	berita acara	103.756.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dan Forum OPD)										
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun (Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Perbup RKPD)	3	dokumen	207.186.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	dokumen	190.912.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan	100	persen	77.500.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	BAPPELITBANGDA	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun	100	persen	32.164.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Daerah		ketentuan				Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		sesuai dengan ketentuan				
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan daerah	3	dokumen	77.500.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	dokumen	32.164.000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	105.548.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	87.985.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						unan Daerah						
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen pelaporan kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2	laporan	62.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	Jumlah laporan hasil pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	2	laporan	25.731.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	4	laporan	43.548.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	BAPPELITBANGDA	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	laporan	62.254.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pembangunan Daerah						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan	97,05 95,12 94,74	persen persen persen	934.775.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan	97,05 95,12 94,74	persen persen persen	387.953.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan Wilayah						program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34	dokumen	603.675.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34	dokumen	167.534.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	'Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (10 OPD dan 18 kec/15 urusan)	28	dokume n	68.200.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28	dokume n	69.807.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	'Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (6OPD/9 urusan)	6	dokume n	49.250.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	6	dokume n	61.942.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		RKPD)				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	4	kegiatan	486.225.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	laporan	35.785.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6	dokumen	115.550.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6	dokumen	89.458.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (4 OPD/6 urusan)	4	dokumen	45.275.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	60.293.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Kemiskinan, Road Map Pangan dan Gizi, PEL)	3	kegiatan	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	laporan	10.375.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (2 OPD/3 urusan)	2	dokumen	45.275.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	dokumen	18.790.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	dokume n	215.550.000	Koordina si Perencan aan Bidang Infrastru ktur dan Kewilaya han		Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	dokume n	130.961.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (2 OPD/2 urusan)	2	dokume n	46.850.000	Koordinas i Penyusun an Dokumen Perencan aan Pembang unan Daerah Bidang	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan	2	dokume n	60.946.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Kebutuh an Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		RKPD)				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (4 urusan/4 OPD)	4	dokumen	23.425.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	60.293.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	BAPPELITBANGDA	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Keciptakarya, Persampahan, Air	4	kegiatan	145.275.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	2	laporan	9.722.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Bersih Air Minum, dan permukiman)				dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPELITBANGDA					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPELITBANGDA					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	Cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan	35,71	persen	122.400.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	Cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan	35,71	persen	75.700.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPELITBANGDA	Jumlah Inovasi dan Inovasi yang di Fasilitas	350	inovasi	122.400.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPELITBANGDA	Jumlah Inovasi dan Inovasi yang di Fasilitas	70	inovasi	75.700.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPELITBANGDA	Jumlah rekomendasi izin penelitian, jumlah inventor yang mengikuti lomba krenova, jumlah KKN	250 100 7	izin inventor PT	77.125.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	297	laporan	32.008.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	2	workshop	45.275.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	laporan	43.692.000	
		TOTAL			6.471.507.000			TOTAL			5.552.789.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu sumber program/kegiatan adalah usulan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Usulan dimaksud berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat / LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Terhadap usulan-usuan tersebut, dilakukan penelaahan kesesuaian dengan mempersandingkannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terhadap usulan -usulan yang sesuai diakomodasikan dalam bentuk program/kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

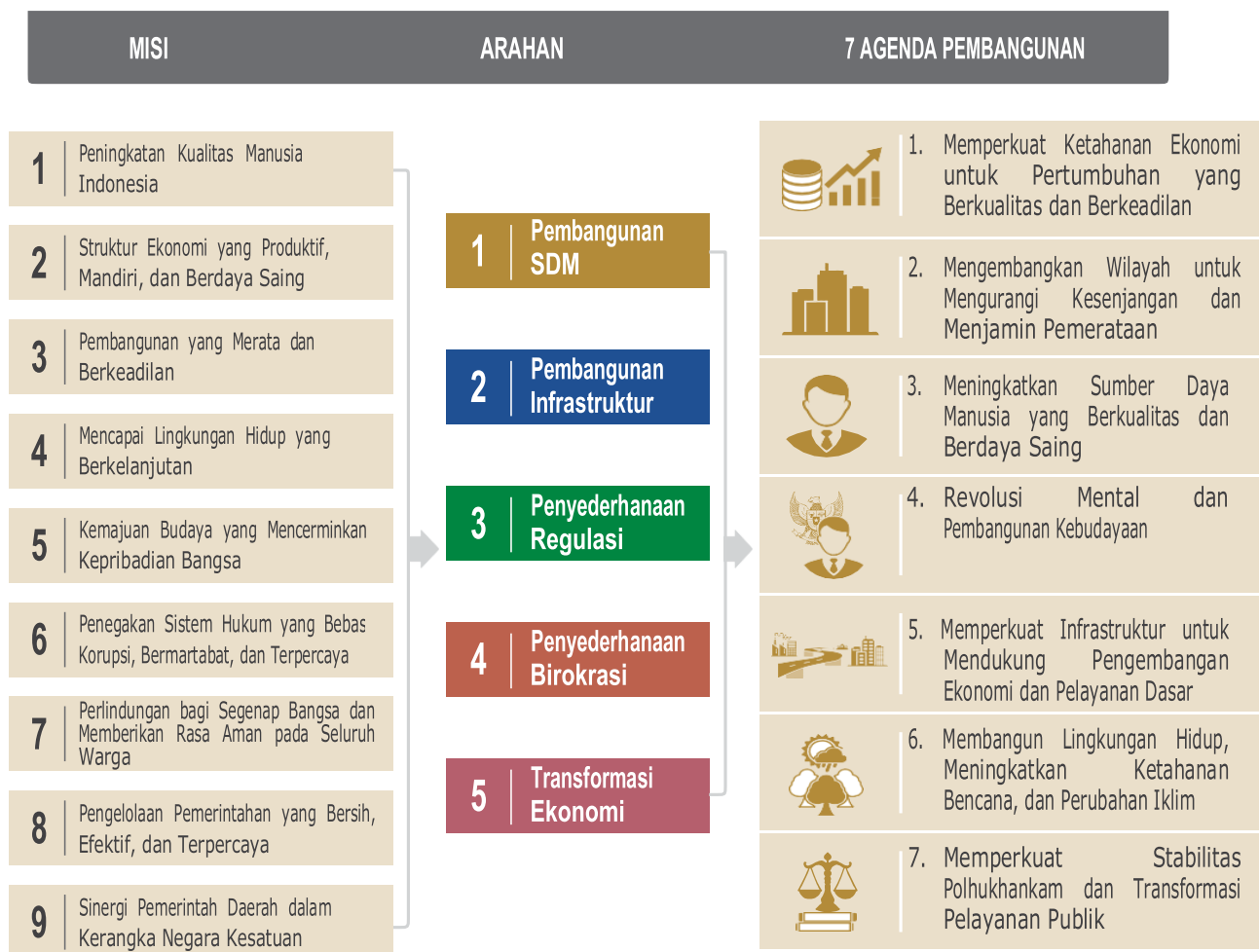
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut dengan telah dilantiknya Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu tahun 2019, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020.

Dokumen perencanaan ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

VISI PRESIDEN

*Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong*



Dari ketujuh Agenda Pembangunan, Bappelitbangda merupakan perangkat daerah yang bertugas mendukung pelaksanaan Agenda ke 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan / Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam hal ini Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas. Indikator tujuan/target Capaian Skor Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah / 22

SASARAN

1. Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan. Indikator sasaran/target Capaian tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD / 96
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda. Indikator sasaran/target Capaian Nilai SAKIP Bappelitbangda / 75

3. Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Indikator sasaran/target Capaian Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan / 76.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	4,649,480,000	DAU		100	4,963,144,000
	- Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti		100	Persen				100	
	- Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen				100	
	- Presentase pengelolaan		100	Persen				100	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Admimistrasi Aset Milik daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang Milik daerah - Persentase pemeliharaan barang Milik daerah								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	4,565,000			100	11,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPP ELITB ANGD A	2	Dokumen	2,490,000			2	6,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB)	BAPP ELITB ANGD A	5	Laporan	2,075,000			5	5,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	3,947,321,000			100	4,062,904,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPP ELITB ANGD A	29	Orang/bulan	3,755,471,000			31	3,721,116,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPP ELITB ANGD A	99	Dokumen	132,242,000			195	198,161,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPP ELITB ANGD A	1202	Dokumen	59,608,000			1202	143,627,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	6,756,000			100%	16,280,000
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPP ELITB ANGD A	2	Laporan	6,756,000			2	16,280,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	BAPP ELITB ANGD A	43	Orang	52,915,000			11	127,500,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPP ELITB ANGD A	11	Orang	11,413,000			11	27,500,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPP ELITB ANGD A	43	Orang	41,502,000			43	100,000,000
Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPP ELITB ANGD A	12	Bulan	35,141,000			12	84,610,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPP ELITB ANGD A	10	Paket	1,826,000			10	4,400,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPP ELITB ANGD	10	Paket	12,477,000			12	30,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		A							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPP ELITB ANGD A	12	Dokumen	996,000			24	2,400,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPP ELITB ANGD A	12	Laporan	2,739,000			12	6,600,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPP ELITB ANGD A	12	Laporan	7,989,000			12	19,250,000
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPP ELITB ANGD A	24	Dokumen	9,114,000			12	21,960,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPP ELITB ANGD A	12	Bulan	427,518,000			12	417,046,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPP ELITB ANGD A	6	Laporan	630,000			12	1,520,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPP ELITB ANGD A	12	Laporan	104,640,000			12	92,400,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPP ELITB ANGD A	1	Laporan	622,000			12	1,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPP ELITB ANGD A	14	Laporan	321,626,000			15	321,626,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPP ELITB ANGD A	12	Bulan	175,264,000			12	243,804,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPP ELITB ANGD A	30	Unit	148,384,000			33	179,035,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPP ELITB ANGD A	10	Unit	6,129,000			10	14,769,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BAPP ELITB ANGD A	1	Unit	20,751,000			1	50,000,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	BAPP ELITB ANGD A	- 100 - 82,33 - 100	Persen Persen Persen	439,656,000			- 100 - 82,96 - 100	1,259,350,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	319,507,000			100	969,850,000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPP ELITB ANGD A	284	Dokumen	24,839,000			284	59,850,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPP ELITB ANGD A	5	Berita Acara	103,756,000			5	450,000,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	5	Dokumen	190,912,000			3	460,000,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	32,164,000			100	77,500,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPP ELITB ANGD A	1	Dokumen	32,164,000			3	77,500,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPP ELITB ANGD A	100	Persen	87,985,000			100	212,000,000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPP ELITB ANGD A	2	Laporan	25,731,000			2	62,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPP ELITB ANGD A	4	Laporan	62,254,000			4	150,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	BAPP ELITB ANGD A	97,05 95,12 94,74	persen persen persen	387,953,00 0			97,64 95,12 94,74	1,334,775,0 00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan	BAPP ELITB ANGD A	34	dokumen	167,534,00 0			24	803,675,00 0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Manusia								
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	28	Dokumen	69,807,000			28	168,200,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	6	Dokumen	61,942,000			6	149,250,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	BAPP ELITB ANGD A	6	Laporan	35,785,000			4	486,225,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Pembangunan Manusia	Manusia								
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPP ELITB ANGD A	6	Dokumen	89,458,000			6	215,550,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	4	Dokumen	60,293,000			4	145,275,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPP ELITB ANGD A	4	Laporan	10,375,000			4	25,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	2	Dokumen	18,790,000			2	45,275,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPP ELITB ANGD A	6	Dokumen	130,961,000			6	315,550,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	2	Dokumen	60,946,000			2	146,850,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPP ELITB ANGD A	2	Laporan	9,722,000			2	23,425,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPP ELITB ANGD A	4	Dokumen	60,293,000			4	145,275,000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	BAPP ELITB ANGD A	35.71	persen	75,700,000			37,14	182,400,000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	BAPP ELITB ANGD A	70	inovasi	75,700,000			70	182,400,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPP ELITB ANGD A	297	Dokumen	32,008,000			297	137,125,000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPP ELITB ANGD A	2	Laporan	43,692,000			2	45,275,000
	TOTAL				5,552,789,000				7,739,669,000

Pada rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 ditemukan beberapa perbedaan antara indikator dan target sub kegiatan pada Renstra tahun 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan regulasi yaitu :

1. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
3. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 diterbitkan untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan lampiran huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan usulam Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan atau Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dengan adanya perubahan regulasi dan kemampuan keuangan daerah pada masa periode Renstra tahun 2021-2026 sehingga menimbulkan perbedaan beberapa indikator dan target antara Renstra 2021-2026 dengan Renja tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Purbalingga, 28 Juli 2022

KERAJAAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **28 Juli 2022**

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR